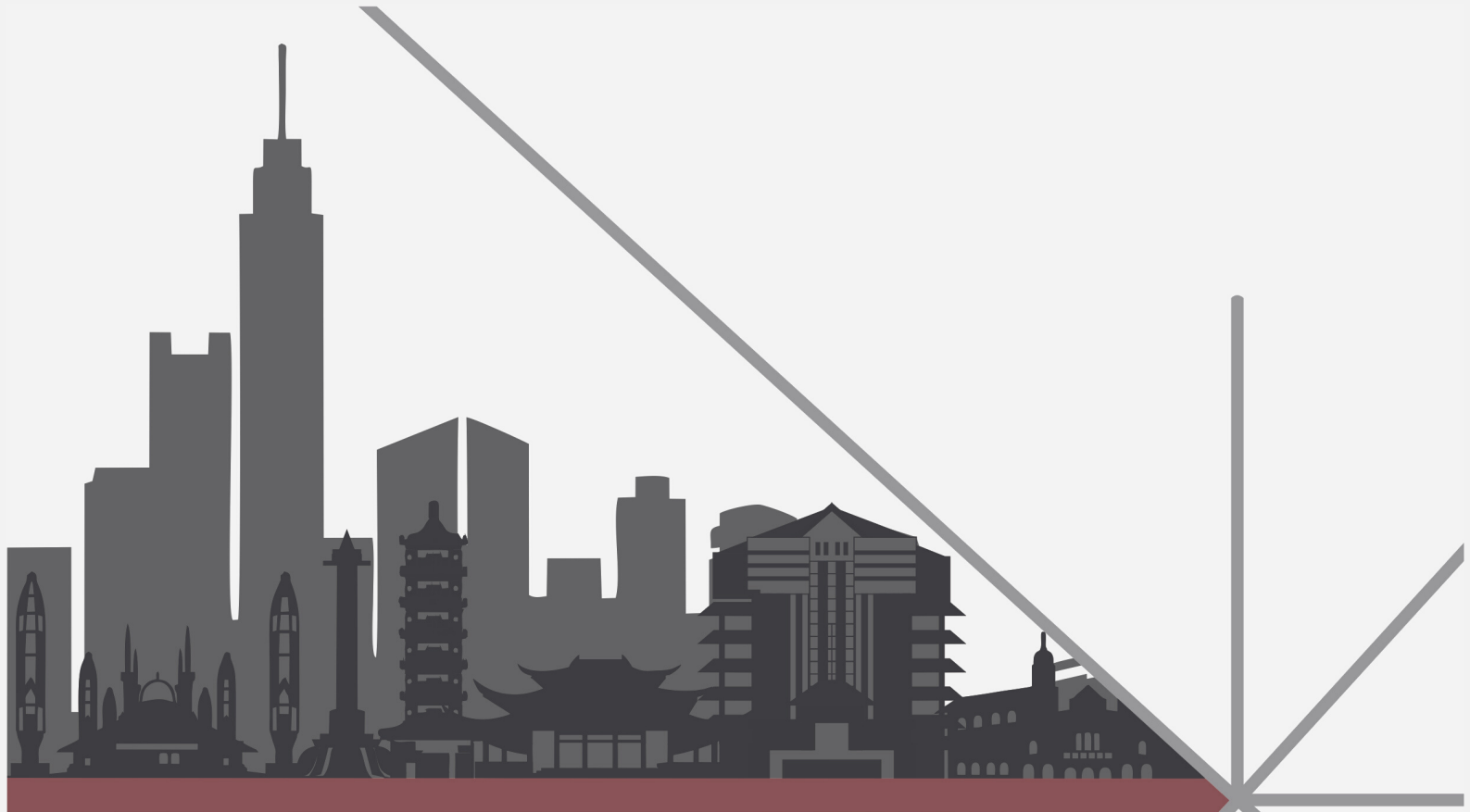




**INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah

**20
22**

Semester I

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Semester I Tahun 2022. Ikhtisar ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur selaku Pimpinan Daerah Provinsi, sebagaimana tertuang dalam piagam audit intern APIP Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2017.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester I Tahun 2022 ini berisi kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Ikhtisar ini disusun dengan harapan:

- a. Memberikan informasi perkembangan seluruh hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Memberikan informasi kegiatan pengawasan dan sebagai referensi dalam upaya perbaikan kinerja pengawasan di masa mendatang dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintah yang baik.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2022 ini disusun, semoga bermanfaat.

Semarang, Juli 2022

**Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Inspektur Pembantu Khusus**

DHONI WIDIANTO, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
A. DASAR HUKUM.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. KEBIJAKAN STRATEGIS	3
1. Eksternal.....	3
2. Internal.....	4
D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP	7
E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya	8
F. Kode Etik AAPII.....	10
BAB II HASIL PENGAWASAN	12
A. Audit/Pengawasan	12
1. Audit Kinerja	12
2. Audit/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (ADTT).....	15
B. Reviu	17
C. Evaluasi.....	22
D. Pemantauan	23
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	24
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	32
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	32
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	33
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	36
A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	36
B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota	37
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	38
A. Simpulan	38

B. Hambatan.....	39
C. Rekomendasi	39
Lampiran 1.....	40
Lampiran 2.....	46
Lampiran 3.....	50
Lampiran 4.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	6
Tabel 1.2	Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya	10
Tabel 2.1	Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	13
Tabel 2.2	Rekomendasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	14
Tabel 2.3	Realisasi ADTTahun 2021	16
Tabel 2.4	Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus Tahun 2022	17
Tabel 2.5	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	18
Tabel 2.6	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	20
Tabel 2.7	Data Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.....	25
Tabel 2.8	Perbandingan capaian MCP KORSUPGAH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021	27
Tabel 3.1	Status Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2005-2022	33
Tabel 3.2	Status Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2022.....	34
Tabel 4.1	Pelimpahan Aduan kepada Kabupaten/Kota	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar 1.2	Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	6
Gambar 2.1	Profil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa tengah Tahun 2014-2021	20

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021; dan
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

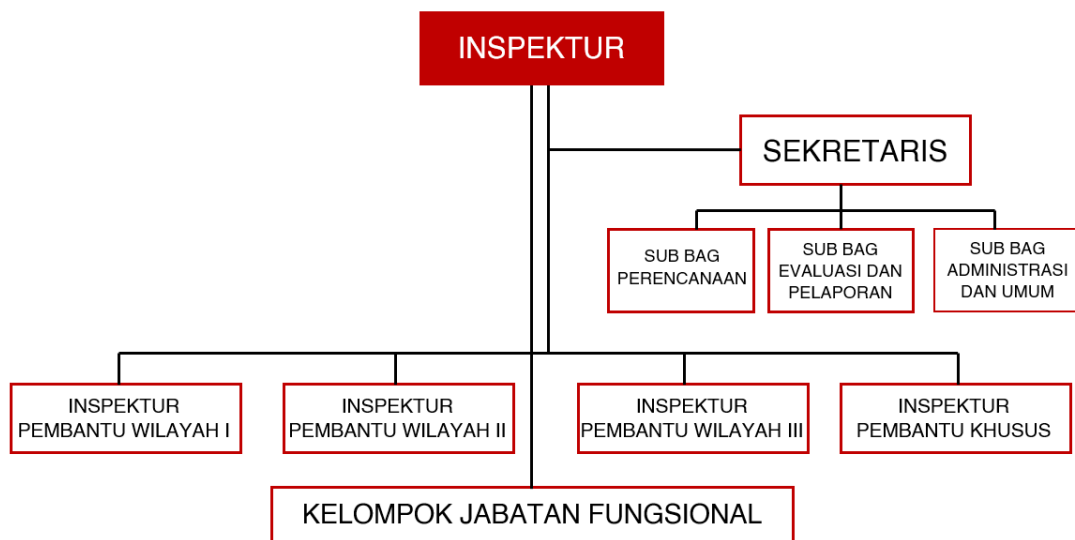
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur organisasi dan nama pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Plt. Inspektur : Dhoni Widiyanto, S.Sos., M.Si.
- b. Sekretaris : Nur Rohmat, S.Sos., M.Si.
 - 1) Sub Bagian Administrasi & Umum : Sri Rahayuningsih, S.E., MM.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan : M. Yusdi Noviadi, S.T., MBA.
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan : Bagus Panuntun, S.STP, MA.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I : Drs. Antonius Trihananto
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II : Soemarijono, S.E., M.Si.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III : Ratna Luhung T., S.E., MM.
- f. Inspektur Pembantu Khusus : Dhoni Widiyanto, S.Sos., M.Si.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - 1) Auditor;
 - 2) Auditor Kepegawaian; dan
 - 3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Gambar 1. 1 Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah



C. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Eksternal

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan *tagline* “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misi kedua yaitu: “Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota” merupakan komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang bebas dari korupsi. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sejalan dengan tujuan Gubernur Jawa Tengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 untuk menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel, sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ikut berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut. Hal ini tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

2. Internal

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023 yaitu:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan beberapa strategi yang harus dilakukan. Adapun strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- b. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- c. Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota;
- d. Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- g. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dibutuhkan kebijakan-kebijakan internal.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yaitu:

- a. Menjadi mitra Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reviu;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
- c. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
- d. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertera dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yaitu:

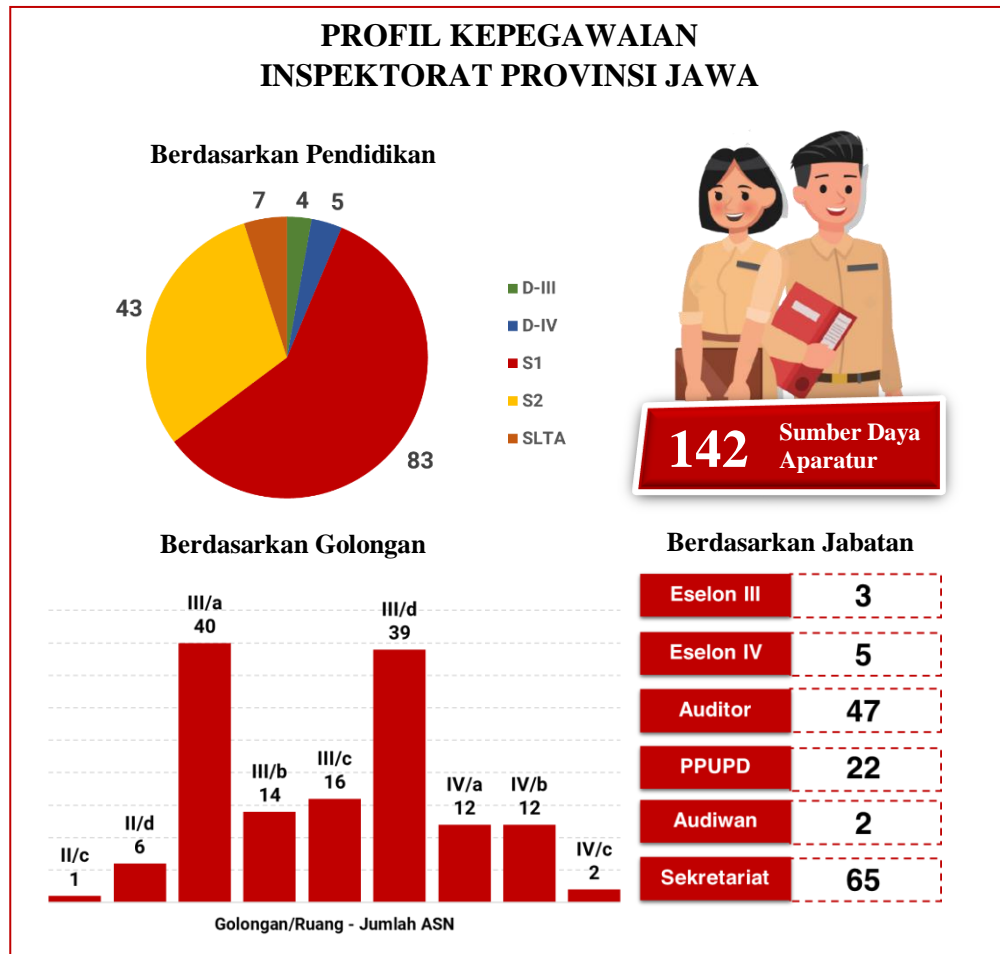
- a. Level Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran adalah Kapabilitas APIP Level 3 penuh pada elemen:
 - Peran dan Layanan (elemen 1);
 - Praktik Profesional (elemen 3); dan
 - Struktur Tata Kelola (elemen 6).
- b. Nilai Maturitas SPIP dengan indikator sasaran adalah Maturitas SPIP Nilai 3,19.

Guna mencapai tujuan sebagaimana target yang tertuang dalam RPJMD perlu didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 142 sumber daya aparatur. Dari jumlah tersebut, tidak ada ASN di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan golongan/pangkat I, golongan/pangkat II/a dan II/b, serta golongan/pangkat IV/c dan IV/d. Golongan/pangkat ASN didominasi oleh golongan/pangkat III dengan tingkat pendidikan mayoritas adalah Sarjana S1/D-IV.

Selengkapnya data ASN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Sumber daya aparatur/kepegawaian Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

b. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana yang dirincikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.519	12.485.050.439
	- Alat Besar	6	169.042.000
	- Alat Angkutan	33	4.205.343.456
	- Alat Bengkel dan Ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	992	4.708.561.400
	- Alat Studio Komunikasi Pemancar	103	982.658.165

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
	- Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
	- Alat Komputer	346	2.217.523.418
3.	Gedung dan Bangunan	4	13.139.885.450
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	14.310.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	181	21.073.000
	- Bahan Perpustakaan	180	19.073.000
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
JUMLAH		1.704	25.646.008.889

D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester I Tahun 2022 ini sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;
3. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
4. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; dan
5. Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.

E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya

Kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Kegiatan pengawasan tersebut antara lain meliputi:

1. Audit Kinerja, pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. SMA/SMK/SLB Negeri;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu, pada:
 - a. Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi;
 - b. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - c. Wajib Lapo LHKPN;
 - d. Bantuan Keuangan Pemerintah Desa;
 - e. Pelayanan Publik UPTD Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Audit Gender;
 - g. Sistem IT UKPBJ;
 - h. *Probit* Audit;
 - i. Kepatuhan UKPBJ;
 - j. Pengelolaan SDM;
 - k. Proses Perizinan dan Non Perizinan;
 - l. Bantuan Sosial;
 - m. Optimalisasi Aset; dan
 - n. Belanja Hibah

3. Reviu, pada:
 - a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Dokumen Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD);

- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - f. Standar Satuan Harga (SSH);
 - g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - h. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - j. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
 - k. Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Jawa Tengah.
4. Evaluasi, pada:
- a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
 - b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Perangkat Daerah; dan
 - c. Benturan Kepentingan.
5. Pemantauan pada limpahan Kasus Aduan Masyarakat ke Kabupaten/Kota;
6. Pengawasan lainnya yang terdiri dari:
- a. Fasilitasi, Pendampingan Pengisian, dan Verifikasi LHKPN dan LHKASN 2022 serta Persiapan LHKPN 2023 (Pengumpulan Data Wajib Laporan);
 - b. Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas;
 - c. Sosialisasi Saber Pungli;
 - d. Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH);
 - e. Konsultasi capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Monitoring Capaian Stranas PK;
 - g. Reviu Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko;
 - h. Pendampingan dan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi;
 - i. Asistensi Pembangunan Zona Integritas;
 - j. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota;

- k. Koordinasi Kapabilitas APIP; dan
- l. Pengawasan Capaian SPM.

Tabel 1.2 Program Kerja Pengawasan dan Realisasi Semester I Tahun 2022
Berdasarkan PKPT Tahun 2022

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			
		Target		Realisasi	
		Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp)
A.	Audit	256	3.682.830.000	158	2.750.943.480
	- Kinerja	80	1.260.330.000	51	1.450.249.821
	- ADTT	71	2.001.650.000	53	1.003.291.284
	- Reviu	105	420.850.000	103	297.402.375
B.	Evaluasi	56	132.910.000	-	-
C.	Pemantauan	2	34.500.000	65	212.685.916
D.	Kegiatan Pengawasan Lainnya	52	1.150.850.000	72	793.345.134
	Jumlah	366	5.001.090.000	502	3.756.974.530

F. Kode Etik AAPII

Pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah dilaksanakan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang. Untuk itu upaya peningkatan profesionalisme auditor secara berkesinambungan menjadi penting guna mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah tersebut perlu ada wadah yang mewakili profesi auditor intern pemerintah secara keseluruhan, menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat, kehormatan, moral dan integritas yang tinggi, mengembangkan dan melaksanakan telaah sejawat untuk menciptakan kepercayaan atas hasil kerja auditor intern pemerintah, dan menyediakan wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi, serta usaha-usaha bersama lain yang diperlukan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, adalah instansi pemerintah yang berhak untuk mengemban tugas pengawasan intern yang meliputi: audit, reviu, evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya, dalam rangka memberikan nilai tambah bagi efektivitas dan efisiensi organisasi, maka dengan adanya implementasi Kode Etik bagi para auditor yang merupakan subyek dari pengawasan tertentu tersebut, dipastikan akan membantu organisasi/instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good goverment*) sebagai bagian dari tugas nasional.

Dalam penerapan kode etik, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman secara khusus pada Kode Etik AAPI yang merupakan aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi auditor Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman umum ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kode etik di lingkungan APIP dengan melakukan sosialisasi pada seluruh auditor dan aktif melakukan pemantauan terhadap penerapan kode etik untuk memastikan bahwa kode etik telah ditegakkan sehingga menciptakan kepercayaan atas hasil kerja APIP.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah termasuk pemeriksaan kasus dan khusus, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan telah dilaksanakan 2 (dua) kali Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Selain itu juga terdapat 16 (enam belas) pengiriman Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan/*Workshop*/Sosialisasi di sepanjang tahun 2022 ini.

Adapun hasil kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 akan lebih rinci dijelaskan pada subbab selanjutnya.

A. Audit/Pengawasan

1. Audit Kinerja

Dalam melaksanakan audit/pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan. Pada tahun 2022 PKPT tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Pada semester 1 tahun 2022, jumlah dan jenis temuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 474 temuan dan 687 rekomendasi dengan potensi kerugian daerah sebesar Rp1.306.987.953,85. Jumlah dan jenis temuan serta kerugian daerah dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Temuan Hasil Audit/Pengawasan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp)
Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan		1	213	44,94	1.306.987.953,85
1	Kerugian Negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01	114	24,05	1.302.032.953,85
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02	3	0,6	4.955.000,00
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03	2	0,43	0,00
4	Administrasi	1.04	93	19,62	0,00
5	Indikasi tindak pidana	1.05	1	0,21	0,00
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2	213	44,94	0,00
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01	55	11,6	0,00
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02	74	15,61	0,00
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03	84	17,72	0,00
Temuan 3 E		3	48	10,13	0,00
1	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01	1	0,21	0,00
2	Ketidakefisienan	3.02	1	0,21	0,00
3	Ketidakefektifan	3.03	46	9,7	0,00
Jumlah Kejadian/Temuan			474	100%	1.306.987.953,85

Tabel 2.1 di atas menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari total temuan dapat dilihat bahwa temuan terkait kelemahan sistem

pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 44,94% dan temuan 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien) sebesar 10,13%. Temuan-temuan tersebut dapat menunjukkan perbaikan apa yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kapasitas daerah dan menekan terjadinya temuan pada tahun selanjutnya. Persentase terbanyak temuan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, sehingga fungsi pembinaan pengendalian internal dan penekanan terhadap peraturan penting dan wajib dilakukan.

Terhadap 474 temuan di atas, Inspektorat telah memberikan 687 rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan/tindak lanjutnya. Rekomendasi dirancang untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalkan akibat dari kelemahan yang ada. Pengelompokan rekomendasi temuan hasil audit/pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rekomendasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Rekom	%	Nilai (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	97	14,12	740.418.244,14
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	32	4,66	129.984.159,71
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	156	22,71	407.306.250,00
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	97	14,12	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	5	0,73	0

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Rekom	%	Nilai (Rp)
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	1	0,15	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	273	39,74	29.279.300,00
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	11	1,6	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	6	0,87	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	9	1,31	0
14	Lain-lain	0	0	0
TOTAL		687	100	1.306.987.953,85

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa rekomendasi yang paling sering diberikan adalah perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan sebanyak 273 rekomendasi atau sekitar 39,74% dari total rekomendasi yang diberikan. Sedangkan menurut nilai temuan, maka rekomendasi yang paling banyak diberikan adalah penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/BUMD dan masyarakat yaitu sebesar Rp740.418.244,14.

2. Audit/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit kinerja. Selama tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan ADTT pada:

- a. Audit Kepatuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

- b. Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Sragen.
- c. Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak.
- d. Pelayanan Publik sebanyak 7 (tujuh) kali pada Unit Pelayanan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah, di Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pekalongan.
- e. Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi sebanyak 15 (lima belas) kali pada SMA/SMK di Kab. Jepara, SMA/SMK di Kab. Purworejo, SMA/SMK di Kab. Banjarnegara, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD dr. Moewardi, RSJD dr. Amino Gondohutomo, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, serta Dinas Kepemudaan Olahraga dan Periwista.
- f. Probit Audit sebanyak 3 (tiga) kali pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, dan RSUD Tugurejo.

Realisasi audit dengan tujuan tertentu selama semester I tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Realisasi ADTT Semester I Tahun 2022

No	Kegiatan	PKPT	
		Target	Realisasi
		Jumlah Objek	Jumlah Objek
1.	Audit Kepatuhan	1	3
2.	Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa	6	10
3.	Bantuan Keuangan pada Kab/Kota	3	3

No	Kegiatan	PKPT	
		Target	Realisasi
		Jumlah Objek	Jumlah Objek
4.	Pelayanan Publik	8	8
5.	Audit Khusus/Kasus/ Aduan Masyarakat/ Investigasi	24	15
6.	Probity Audit	12	4
Jumlah		54	43

Sedangkan hasil pemeriksaan kasus yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sampai dengan semester I tahun 2022 yang disajikan dalam Tabel 2.4 menunjukkan tidak ada kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dari jumlah kasus tersebut juga tidak terdapat kasus yang dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum.

Tabel 2.4 Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus Tahun 2022

Keterangan	Jumlah
Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus	17
Jumlah Pemeriksaan Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0
% Pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0%

B. Reviu

Dalam menjalankan perannya, APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari yang sebelumnya *watch dog* (sekedar mencari-cari kesalahan) menjadi lebih focus pada unsur pembinaan yang bersifat pencegahan (*preventive*), konsultasi (*consultative*), dan pemberian keyakinan (*quality assurance*), pada program-program strategis, yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning system*, pendampingan, dan pembinaan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah seyogyanya mampu mengawal dalam mencapai nilai, tujuan, dan sasaran utama melalui proses *quality assurance* dan mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, sehingga dapat menghasilkan *long-term values* bagi organisasi pada area tata kelola, risiko, dan pengendalian

dengan sudut pandang *oversight*, *insight*, dan *foresight*, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun nilai-nilai yang bersifat prosedural. Dalam melaksanakan peran APIP tersebut salah satunya yaitu melalui kegiatan reviu. Reviu merupakan penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 10 (sepuluh) reviu selama semester I tahun 2022, yaitu:

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dengan hasil opini LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

Tabel 2.5 Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2021

Tahun	Opini BPK RI
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini ini menambah satu lagi prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah sebelumnya telah mendapatkan opini WTP sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut atas LKPD dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2021 dan pemberian opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dalam

sidang paripurna DPRD Jawa Tengah 25 Mei 2022. Adapun pergerakan opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 2.5.

2. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), ditegaskan bahwa data dan dokumen pendukung LPPD sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan reviu atas LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu terhadap LPPD Provinsi Jawa Tengah sebelum ditandatangani Gubernur.

3. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

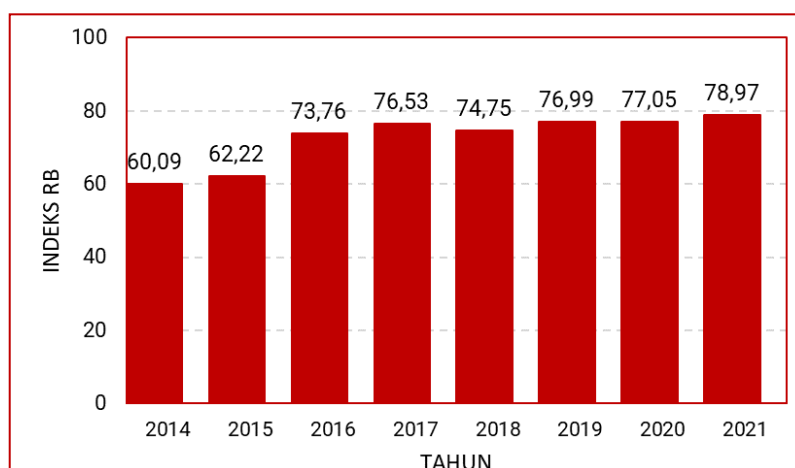
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Reviu RKPD yaitu Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Reviu ini selesai dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 094/199/TU/2022.

4. Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu PMPRB pada seluruh perangkat daerah (49 OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi telah disajikan dengan data dukung yang akurat, andal, dan valid. Nantinya, pelaksanaan reformasi birokrasi ini akan dilakukan evaluasi oleh Kemenpan RB dan menghasilkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan surat dari MENPAN RB Republik Indonesia Nomor B/91/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022, hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah 78,97. Rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dan Indeks Reformasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.6.

Gambar 2.1 Profil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021



Tabel 2.6 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A. Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	10,00	15,12	16,92
2.	Hasil Antara Area Perubahan	30,00	6,65	6,52
3.	Reform	60,00	19,37	21,06
Total Komponen Pengungkit		60,00	41,14	44,50
B. Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,64	8,71
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,93	8,76
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,30	8,56
4.	Kinerja Organisasi	10,00	9,05	8,44
Total Komponen Hasil		40,00	35,91	34,47
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,0	77,05	78,97

5. Reviu Stock Vaksin

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Reviu Selisih Stok Vaksin hasil pemeriksaan fisik persediaan Tim BPK dan selisih distribusi

Vaksin Sinovac sebanyak 800 dosis. Reviu ini telah selesai dilaksanakan pada 22 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 094/90/TU/2022.

6. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik

Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2022 di bidang irigasi, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup dan kehutanan, bidang pariwisata, bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta bidang kelautan dan perikanan yang selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Reviu dilakukan di 7 (tujuh) Perangkat Daerah, yaitu:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- 2) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6) Dinas Kesehatan; dan
- 7) Dinas Kelautan dan Perikanan.

7. Reviu Manajemen ASN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Manajemen ASN berupa Reviu Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Reviu ini selesai dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022.

8. Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah pada 2 OPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah selesai dilaksanakan pada 21 April 2022 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah selesai dilaksanakan pada 28 April 2022.

9. Reviu Tata Kelola Perizinan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah pada 19 April 2022.

10. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 22 April 2022.

C. Evaluasi

1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan rencana pelaksanaan pada bulan Juli 2022.

2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Perangkat Daerah

Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB untuk SAKIP Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 80,25 atau predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah baik.

Pada tahun 2022 evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB baru akan dimulai di semester II tahun 2022 pada bulan Agustus.

3. Evaluasi Benturan Kepentingan

Evaluasi benturan kepentingan dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas dengan guna mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, memberikan pelayanan publik yang baik dan

berkualitas. Dalam hal evaluasi benturan kepentingan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan mengevaluasi implementasi penanganan benturan kepentingan di OPD Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2021, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan di 24 OPD Provinsi Jawa Tengah dengan ruang lingkup evaluasi yang terdiri dari identifikasi potensi benturan kepentingan, pelaporan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan dan pencegahan benturan kepentingan. Hasil dari evaluasi tersebut didapatkan bahwa penanganan benturan kepentingan di OPD Provinsi Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan karena terdapat beberapa kelemahan diantaranya:

- a. Beberapa OPD belum melakukan identifikasi internal benturan kepentingan
- b. Beberapa OPD belum menginput hasil identifikasi ke aplikasi si Beken
- c. Beberapa OPD sudah menginput hasil identifikasi ke aplikasi si Beken tapi belum menyeluruh (belum sampai di tingkat balai/UPTD)
- d. Beberapa OPD belum ada pelaporan BK
- e. OPD belum melakukan penanganan BK
- f. Beberapa OPD belum melakukan sosialisasi internal BK
- g. Sudah dilakukan sosialisasi internal tetapi belum menyeluruh
- h. Belum menyusun SOP tentang pelaporan dan pencegahan BK

Sedangkan untuk tahun 2022, evaluasi benturan kepentingan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ke OPD Provinsi Jawa Tengah direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2022.

D. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan pemantauan atas limpahan kasus aduan masyarakat ke Kabupaten/Kota. Hasil pemantauan TLHP dan limpahan

kasus aduan masyarakat ke Kab/Kota lebih rinci dijelaskan pada BAB III dan BAB IV.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya, antara lain kegiatan Bimbingan Teknis sebanyak 1 (satu) kali yaitu Bimbingan Teknis Persiapan Kegiatan Reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Provinsi Jawa Tengah (30 s.d. 31 Maret 2022) dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 1 (satu) kali yaitu PKS Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (12 April 2021). Terdapat pula 16 (enam belas) pengiriman Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan/Workshop/Sosialisasi yang terdiri dari Ujian Sertifikasi Auditor, Pembinaan Disiplin PNS, Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik, Pelatihan Teknis Perbendaharaan, Workshop Pengembangan Aplikasi Simpeg, Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional, Ujian Pembentukan Auditor, Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, Pelatihan Teknis Perencanaan dan Penganggaran, serta Pelaksanaan Persiapan Reviu RTP OPD Provinsi Jawa Tengah.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Secara spesifik, Inspektorat mengemban tugas yang sudah ditentukan dalam Pengendalian Gratifikasi, Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), Reviu Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko, pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota, serta Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

1. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi di Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 (yang merupakan pembaruan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui peraturan Gubernur tersebut, telah dibentuk Subadmin Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah selain Inspektorat dan BUMD dengan harapan Perangkat Daerah tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengendalian gratifikasi di Jawa Tengah berkedudukan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi. Berdasarkan rencana kerja penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 beberapa kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi kepada CPNS baru, Perangkat Daerah, dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta penyampaian informasi gratifikasi melalui media sosial.

Tabel 2.7 Data Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

No	UPG/Subadmin UPG	Jumlah Laporan	Nominal (Rp)
1	Inspektorat	9	2.346.000
2	RSJD Surakarta	2	550.000
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	18.190.000
4	RSUD Tugurejo	1	1.000.000
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	680.000
6	DPMPSTSP	1	150.000
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1.500.000
8	PT BPR BKK Jawa Tengah	5	3.400.000
Total		21	27.816.000

**ata per 30 Juni 2022*

Sampai dengan semester I tahun 2022 terdapat 21 laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG maupun Subadmin UPG dengan nilai finansial mencapai Rp27.816.000,00, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

2. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/10 tanggal 7 Juli 2017 tentang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD wajib untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi pengangkatan Pejabat Struktural dan seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah untuk melaporkan LHKPN. Sampai semester I tahun 2022 jumlah Wajib Laporkan yang sudah melaporkan sebanyak 2.283 orang dari 2.283 orang (100%). Dan dilaporkan pula bahwa seluruh Wajib LHKASN sebanyak 36.281 orang telah melaporkan harta kekayaannya (100%).

3. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus sasaran pencagarah korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Rencana aksi pencegahan korupsi terdiri dari perencanaan penganggaran berbasis elektronik dan implementasi e-katalog dan *e-payment*.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil rencana aksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Timnas PK melalui aplikasi <https://jaga.id/monitoring>. Total capaian pada periode B15 (Triwulan V 2021-2022) sebesar 70,8% sedangkan saat ini sedang dilakukan untuk pemenuhan data dukung untuk periode B18 (Triwulan VI 2021-2022).

4. Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)

Monitoring *Center for Prevention* (MCP) merupakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan melakukan penilaian pada 7 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi. Adapun capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Perbandingan Capaian MCP KORSUPGAH
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021

No.	Area Intervensi	2020	2021
1.	Perencanaan & Penganggaran APBD	100	92,0
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	90,7	97,8
3.	Perizinan	95,0	97,4
4.	Pengawasan APIP	96,9	95,9
5.	Manajemen ASN	97,4	99,5
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	59,9	85,9
7.	Manajemen Aset Daerah	91,6	91,9

Pada tahun 2022, terdapat 38 indikator dan 88 sub indikator pada 8 area intervensi yang menjadi unsur penilaian MCP. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Percepatan Pemenuhan Data MCP pada 21 Maret 2022 yang menghadirkan 9 OPD yang memegang tugas dan fungsi sesuai area intervensi untuk saling berkoordinasi dalam memenuhi data-data yang dibutuhkan untuk penilaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Reviu Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan

perbaikannya. Reviu RTP tahun 2022 dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) dengan tujuan melakukan perbaikan penyusunan dokumen RTP pada OPD di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) serta menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan nilai Level Maturitas SPIP Provinsi Jawa Tengah. Reviu RTP telah dilaksanakan di 49 (empat puluh sembilan) OPD Provinsi Jawa Tengah pada Juni 2022 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/29/S.2/2022.

6. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dimulai dengan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas secara serentak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Mei 2014 yang disaksikan Menteri PAN dan RB-RI, Ketua Ombudsman RI dan Perwakilan KPK-RI. Langkah selanjutnya telah dilakukan penilaian pada beberapa OPD/Unit Kerja. Pada tahun 2018 tidak ada OPD yang memenuhi kriteria dalam hal survei kepuasan masyarakat yang merupakan indikator dalam pengusulan OPD berpredikat WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) OPD yang memperoleh predikat WBBM yaitu RSUD Dr. Margono Soekarjo. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) OPD yang memperoleh predikat dari Kemenpan dan RB, 2 (dua) predikat WBBM yaitu RSUD Dr. Moewardi dan RSUD Tugurejo serta 2 (dua) predikat WBK yaitu DPMPTSP dan DLHK Wilayah I. Sementara itu perolehan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021 telah diraih oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah/Unit yaitu Balatkop (Balai Pelatihan Koperasi dan UKM) Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang) Surakarta.

Tahun ini (2022), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan tahap penilaian internal untuk menilai OPD yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM dengan hasil terdapat 4 OPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM), dan Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Setelah diusulkan, 4 SKP tersebut akan dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB untuk menentukan apakah OPD tersebut layak mendapat predikat WBK/WBBM.

7. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 094/234/TU/2022 tanggal 25 Mei 2022 pada 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dari 27 Mei 2022 hingga 7 Juni 2022 bertempat di 3 (tiga) lokasi berbeda yaitu Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VII, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, dan BPTPHP Salatiga Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah.

8. Telaah Sejawat Ekstern

Telaah Sejawat Ekstern, pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/399/TU/2021 tanggal 25 November 2021. Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap standar. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap standar adalah 79,31%, dengan katagori penilaian “cukup”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut: (1)

Standar Atribut mendapat 91% dan (2) Standar Pelaksana mendapat 68%.

Selain melakukan telaah sejawat ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, penelaahan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sendiri dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelaahan nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap standar adalah 64,61 dengan kategori penilaian “cukup baik” dengan peluang untuk perbaikan lebih lanjut atas pemenuhan standar rinci dimaksud.

9. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah perlu selalu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan ditargetkan juga dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Hasil *quality assurance* BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yaitu dari “Level 2 Dengan Catatan” pada tahun 2016 menjadi “Level 3 Dengan Catatan” pada tahun 2017. Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kapabilitas APIP, sehingga Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai Level 3 Penuh pada tahun 2019.

Tahun 2021 capaian indikator kinerja pada sasaran Kapabilitas APIP masih menggunakan penilaian tahun 2019 dikarenakan baik pada tahun 2020 maupun 2021 tidak dilakukan asesmen dari BPKP terkait penilaian level tersebut. Pada tahun 2022, penilaian mandiri Kapabilitas APIP akan dilakukan dengan asesmen dari BPKP yang dilaksanakan pada bulan Juli

dan Agustus tahun 2022. Sampai saat ini Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih dalam tahap mempersiapkan dokumen pendukung dan penilaian mandiri Kapabilitas APIP.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan upaya antara lain dengan cara mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut. Kegiatan pemantauan tindak lanjut ke Kabupaten/Kota dan perangkat daerah melalui APIP dalam penugasan untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya, dengan status dalam proses tindak lanjut dan belum ditindaklanjuti. Hal tersebut antara lain disebabkan terdapat rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian tindak lanjut lama, temuan sulit ditindaklanjuti, dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang baru terbit.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada tahun 2022 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu pada bulan Juni 2022. Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s.d. tahun 2022 sebanyak 58 LHP dengan jumlah temuan sebanyak 769 temuan dan 1.825 rekomendasi. Rekapitulasi status tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Status Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2008-2022

Tahun IHPS	Temuan	Rekom	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
2005	30	44	44	-	-	-
2006	32	48	48	-	-	-
2007	23	37	47	-	-	-
2008	71	136	97	-	-	39
2009	24	48	37	11	-	-
2010	52	93	90	3	-	-
2011	45	131	105	26	-	-
2012	44	91	80	11	-	-
2013	66	142	142	-	-	-
2014	70	156	142	14	-	-
2015	52	160	141	19	-	-
2016	55	161	138	23	-	-
2017	32	71	45	26	-	-
2018	43	107	86	21	-	-
2019	35	82	55	27	-	-
2020	56	196	120	76	-	-
2021	29	84	37	16	31	-
2022	10	28	-	-	28	-
Jumlah	769	1815	1454	273	59	39

*Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Data hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tersimpan dalam *database* dalam aplikasi SIMWAS. Namun, data yang tersimpan dimulai dari tahun 2014, sedangkan tahun-tahun sebelumnya (2007-2013) pencatatan hasil pemantauan tindak lanjut masih dilakukan secara manual. Data tersebut disajikan dalam Tabel 3.2. Dari Tabel 3.2 dapat di lihat bahwa dari tahun 2007 s.d. tahun 2022 sudah terdapat 26.131 temuan dengan 33.755 rekomendasi. Dari seluruh temuan dan rekomendasi yang ada masih terdapat 516 temuan dan 742 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Tabel 3.2 Status Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2022

No	Tahun	Jumlah Temuan / Status				Jumlah Rekomendasi / Status			
		Σ	S	D	B	Σ	S	D	B
1	2013 s/d 2007	13.466	13.312	129	25	15.936	15.760	143	33
2	2014	1.818	1.762	38	18	2.530	2.426	84	20
3	2015	2.260	2.220	39	1	3.100	3.023	76	1
4	2016	2.115	2.060	55	0	2.864	2.761	103	0
5	2017	1.168	1.153	15	0	1.789	1.758	31	0
6	2018	1.641	1.547	40	54	2.371	2.251	58	62
7	2019	1.530	1.456	54	20	2.055	1.943	70	42
8	2020	775	718	27	30	1.020	953	34	33
9	2021	884	636	119	129	1.403	979	223	201
10	2022	474	156	79	239	687	212	125	350
Jumlah		26.131	25.020	595	516	33.755	32.066	947	742

*Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2

Keterangan:

Σ = jumlah temuan/rekomendasi

S = selesai ditindaklanjuti

D = dalam proses tindak lanjut

B = belum ditindaklanjuti

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri pada bulan April 2021 telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai 10 Provinsi yang Tepat Waktu dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019. Prestasi ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) kali pemeriksaan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan menghasilkan 2 temuan dan 4 rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 terdapat 176 temuan dengan 249 rekomendasi, dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Adapun rincian status temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dapat pada Lampiran 3.

Dari awal tahun 2022, sampai dengan laporan ini dibuat pada Juni 2022, kegiatan pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri belum dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang ditangani Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi aduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, limpahan atau yang diterima dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah. Sepanjang tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 26 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 15, Laporan Gubernur sebanyak 5, media sosial sebanyak 1, limpahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sebanyak 1, limpahan Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 2, dan limpahan Gubernur sebanyak 2. Rincian tercantum dalam Lampiran 4.

Penanganan aduan masyarakat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu pengaduan dilakukan dengan diperiksa sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 9 aduan, pengaduan dilimpahkan ke Kabupaten/Kota sebanyak 13 aduan, dilimpahkan ke OPD sebanyak 1 aduan, dan pengaduan diarsipkan sebanyak 3 aduan. Aduan-aduan yang diarsipkan disebabkan karena aduan tersebut sudah diperiksa sebelumnya.

A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemeriksaan aduan masyarakat sebanyak 9 aduan dengan perincian yaitu telah ditindaklanjuti sebanyak 8 aduan dengan hasil 2 aduan terbukti, 1 aduan tidak terbukti, dan 5 aduan masih dalam proses, dan 1 aduan belum ditindaklanjuti karena aduan tersebut masuk pada 20 Juni 2022.

B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melimpahkan aduan masyarakat kepada Kabupaten/Kota sebanyak 13 aduan. Dari 13 aduan tersebut 2 aduan dinyatakan tidak terbukti, 6 aduan masih dalam proses tindak lanjut, dan 5 aduan belum ditindak lanjuti. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4. 1 Pelimpahan Aduan kepada Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Aduan Dilimpahkan	T	TT	KET	D	B
1.	Kabupaten Grobogan	2	-	-	-	2	-
2.	Kabupaten Banyumas	-	-	-	-	-	-
3.	Kabupaten Brebes	-	-	-	-	-	-
4.	Kabupaten Demak	-	-	-	-	-	-
5.	Kabupaten Jepara	2	-	-	-	1	1
6.	Kabupaten Kendal	1	-	-	-	-	1
7.	Kabupaten Pati	1	-	-	-	1	-
8.	Kabupaten Pemasang	1	-	-	-	-	1
9.	Kabupaten Karanganyar	-	-	-	-	-	-
10.	Kabupaten Magelang	-	-	-	-	-	-
11.	Kabupaten Kebumen	2	-	-	-	1	1
12.	Kabupaten Tegal	1	-	-	-	-	1
13.	Kabupaten Blora	-	-	-	-	-	-
14.	Kabupaten Banjarnegara	-	-	-	-	-	-
15.	Kabupaten Rembang	-	-	-	-	-	-
16.	Kabupaten Wonosobo	-	-	-	-	-	-
17.	Kabupaten Purworejo	-	-	-	-	-	-
18.	Kabupaten Semarang	-	-	-	-	-	-
19.	Kabupaten Cilacap	2	-	1	-	1	-
20.	Kabupaten Batang	-	-	-	-	-	-
21.	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-
22.	Kabupaten Sukoharjo	1	-	1	-	-	-
Jumlah		13	0	2	0	6	5

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, revidi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
2. Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebanyak 474 temuan yang meliputi temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan sebanyak 213 (44,94%), temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 213 (45,38%) dan temuan 3E sebanyak 48 (10,13%) dan menghasilkan total 687 rekomendasi. Status tindak lanjut yang dinyatakan selesai sebanyak 212, dalam proses sebanyak 125, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 350.
3. Hingga semester I tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 26 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 15 aduan, Laporan Gubernur sebanyak 5 aduan, media sosial sebanyak 1 aduan, limpahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sebanyak 1 aduan, limpahan Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 2 aduan, dan limpahan Gubernur sebanyak 2 aduan.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, APIP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya yaitu :
 - a. Hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2022 terdapat 1.454 rekomendasi yang telah selesai (80,11%), 273 rekomendasi dalam proses tindak lanjut (15,04%) dan 59 rekomendasi belum ditindaklanjuti (3,25%).

- b. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 hingga 2022 Semester I terdapat 32.066 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, 947 rekomendasi dalam proses, dan 742 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- c. Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 terdapat 178 temuan dengan 253 rekomendasi. Dari status temuan dan rekomendasi tindak lanjut tersebut sebanyak 176 temuan dan 249 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti. Dari awal tahun 2022, sampai dengan laporan ini dibuat pada Juni 2022, kegiatan pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri belum dilaksanakan.

B. Hambatan

1. Masih terdapat rekomendasi dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum dapat maupun sulit ditindaklanjuti.
2. Adanya tugas/mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat diluar tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
3. Objek pemeriksaan baik Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatkan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah.

C. Rekomendasi

1. Perlu dibuat kebijakan terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditi.
2. Lebih aktif dalam hal pemantauan tindak lanjut sehingga tindak lanjut cepat diproses oleh auditi.
3. Meningkatkan bimbingan teknis pengawasan terutama audit kinerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
4. Melaksanakan *consultant activity* secara aktif terutama pada temuan-temuan yang sering muncul sehingga tidak menjadi temuan berulang.
5. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
TAHUN 2008 S.D. 2022**

No	Objek Pemeriksaan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut											
		Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TAHUN IHPS		2022											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Tahun 2021	7	3.446.043.000	16	1.855.780.000	-	0,00	-	0,00	16	1.855.780.000	-	0,00
2	LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	3	0,00	12	0,00	-	0,00	-	0,00	12	0,00	-	0,00
Jumlah		10	3.446.043.000	28	1.855.780.000	-	0,00	-	0,00	28	1.855.780.000	-	0,00
TAHUN IHPS		2021											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020	10	455.859.641,49	20	455.859.641,49	5	0,00	15	455.859.641,49	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	4	0,00	22	0,00	-	0,00	-	0,00	22	0,00	-	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	11	0,00	33	0,00	32	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 Di Provinsi Jawa Tengah	4	0,00	9	0,00	-	0,00	-	0,00	9	0,00	-	0,00
Jumlah		29	455.859.641,49	84	455.859.641,49	37	0,00	16	455.859.641,49	31	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		2020											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah	12	0,00	74	0,00	43	0,00	31	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	14	943.002.341,33	54	943.002.341,33	23	121.203.688,59	31	821.798.652,74	-	0,00	-	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	9	1.282.856.291,00	15	0,00	15	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasidan Operasional PT. Sarana Patra Hulu Cepu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 (Semester I)	8	4.543.741.029,00	19	4.404.432.999,00	14	2.185.071.975,00	5	2.219.361.024,00	-	0,00	-	0,00

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	13	0,00	34	0,00	25	0,00	9	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		56	6.769.599.661,33	196	5.347.435.340,33	120	2.306.275.663,59	76	3.041.159.676,74	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS : 2019													
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	6	0,00	31	0,00	20		11		-		-	
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Semarang, Jakarta, Pati, Pekalongan, dan Purwokerto	6	84.206.355.059,00	8	0,00	5		3		-		-	
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	23	4.760.376.658,29	43	4.760.376.658,29	30	1.384.193.224,73	13	3.376.183.433,56	-	0,00	-	0,00
Jumlah		35	88.966.731.717,29	82	4.760.376.658,29	55	1.384.193.224,73	27	3.376.183.433,56	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS : 2018													
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	17	0,00	49	0,00	46		3		-		-	
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	26	4.352.135.169,97	58	3.942.862.764,97	40	3.616.697.272,30	18	326.165.492,67	-	0,00	-	0,00
Jumlah		43	4.352.135.169,97	107	3.942.862.764,97	86	3.616.697.272,30	21	326.165.492,67	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS : 2017													
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	18	2.397.949.613,20	32	2.397.949.613,20	27	2.397.949.613,20	5	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017	14	0,00	39	0,00	18	0,00	21	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		32	2.397.949.613,20	71	2.397.949.613,20	86	2.397.949.613,20	21	0,00	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS : 2016													
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	28	2.735.813.152,30	73	2.687.813.152,30	67	724.884.052,30	6	1.962.929.100,00	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	10	0,00	34	0,00	22		12		-		-	

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	11	0,00	44	0,00	43	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00
4	Hasil Pemeriksaan BPK atas Kegiatan Operasional dan Investasi PT Sarana Patra Hulu Cepu Tahun Buku 2014 s.d.Semester I 2015	6	0,00	10	0,00	6	0,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		55	2.735.813.152,30	161	2.687.813.152,30	138	724.884.052,30	23	1.962.929.100,00	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2015											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	33	4.135.352.824,74	108	634.554.123,46	91	478.641.222,76	17	155.912.900,70	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 di Semarang	5	1.984.580.167,03	17	1.984.580.167,03	17	1.984.580.167,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d.Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	6	0,00	14	0,00	12	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010–2014 di Semarang	8	0,00	21	0,00	21	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		52	6.119.932.991,77	160	2.619.134.290,49	141	2.463.221.389,79	19	155.912.900,70	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2014											
1	LHP LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2013	21	1.042.532.185,53	62	1.042.532.185,53	57	1.042.532.185,53	5	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Juli)	32	179.162.421.902,11	66	132.096.321.048,45	57	84.726.582.838,85	9	47.369.738.209,60	-	0,00	-	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Banyumas	17	5.272.720.017,51	28	288.152.868,94	28	288.152.868,94	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		70	185.477.674.105,15	156	133.427.006.102,92	142	86.057.267.893,32	14	47.369.738.209,60	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2013											
1	LHP BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	17	1.032.316.397,00	47	1.014.144.497,00	47	1.014.144.497,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Provinsi Jawa Tengah dan RSUD Dr Moewardi	11	142.379.513,73	14	142.379.513,73	14	142.379.513,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012	13	524.818.000,00	29	524.818.000,00	29	524.818.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan Semester I 2013	25	0,00	52	0,00	52		-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		66	1.699.513.910,73	142	1.681.342.010,73	142	1.681.342.010,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2012											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012	18	15.300.407.190,00	38	10.464.667.860,00	33	4.031.412.813,00	5	6.433.255.047,00	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011	18	2.335.147.801,00	40	1.987.891.611,00	35	1.987.891.611,00	5	0,00	-	0,00	-	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012	8	0,00	13	0,00	12		1	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		44	17.635.554.991,00	91	12.452.559.471,00	80	6.019.304.424,00	11	6.433.255.047,00	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2011											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 di Semarang	12	666.521.328,00	26	666.521.328,00	26	666.521.328,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Semarang	12	867.431.057,99	29	867.431.057,99	29	867.431.057,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2010	9	128.875.889,00	55	128.875.889,00	29	128.875.889,00	26	0,00	-	0,00	-	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 di Surakarta	12	0,00	21	0,00	21		-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		45	1.662.828.274,99	131	1.662.828.274,99	105	1.662.828.274,99	26	0,00	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2010											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 dan 2010	14	488.547.225,00	27	462.877.225,00	26	461.947.225,00	1	930.000,00	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Tahun Buku 2009 dan 2010	11	6.928.588.309,00	23	6.444.088.309,00	22	1.186.838.323,00	1	5.257.249.986,00	-	0,00	-	0,00
3	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2009	11	976.170.781,05	20	976.170.781,05	19	6.380.201,00	1	969.790.580,05	-	0,00	-	0,00
4	Hasil Pemeriksaan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan TA 2008 dan 2009 Provinsi Jawa Tengah	11	11.650.000,00	12	11.650.000,00	12	11.650.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	5	3.491.494.657,46	11	245.732.688,99	11	245.732.688,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		52	11.896.450.972,51	93	8.140.519.004,04	90	1.912.548.437,99	3	6.227.970.566,05	-	0,00	-	0,00

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TAHUN IHPS		: 2009											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	7	947.934.146,22	13	947.934.146,22	5	112.722.419,00	8	835.211.727,22	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2008 di Semarang	17	212.311.104,98	35	212.311.104,98	32	62.083.288,00	3	150.227.816,98	-	0,00	-	0,00
Jumlah		24	1.160.245.251,20	48	1.160.245.251,20	37	174.805.707,00	11	985.439.544,20	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2008											
1	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Atas Kegiatan Operasional BPD Jateng Tahun Buku 2006 dan 2007	19	0,00	32	0,00	32		-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2007	20	21.385.027.425,48	40	20.710.817.809,00	40	20.710.817.809,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		39	21.385.027.425,48	72	20.710.817.809,00	72	20.710.817.809,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2007											
1	LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2006	20	17.707.186,14	43	17.707.186,14	43	17.707.186,14	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 dan Smt I 2007	3	0,00	4	0,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		23	17.707.186,14	47	17.707.186,14	47	47	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2006											
1	Laporan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 di Semarang	19	2.929.728.157,00	28	2.475.133.157,00	28	2.475.133.157,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Hasil Pemeriksaan atas (Audit Tujuan Tertentu) pada Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Tahun Buku 2005 dan 2006 di Semarang	13	1.328.890.115,78	20	1.328.890.115,78	20	1.328.890.115,78	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah		32	4.258.618.272,78	48	3.804.023.272,78	48	3.804.023.272,78	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TAHUN IHPS		: 2005											
1	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004	6	87.006.179,00	7	87.006.179,00	7	87.006.179,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Propinsi Jawa Tengah di Semarang	8	5.771.394.781,61	12	5.771.394.781,61	12	5.771.394.781,61	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	Hasil Pemeriksaan atas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Buku 2004 dan 2005 di Semarang	16	26.359.993,92	15	26.359.993,92	15	26.359.993,92	-		-		-	
Jumlah		30	5.884.760.954,53	44	5.884.760.954,53	44	5.884.760.954,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Semarang, Juli 2022
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Inspektur Pembantu Khusus



DHONI WIDIANTO, S.Sos.,M.Si.

Perbina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002

Lampiran 2

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 S.D. 2022**


No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2022												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	213	342	1.306.987.953,85	73	104	135.288.442,52	25	46	442.770.011,00	115	192	728.929.500,33
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	213	275	0	72	94	0	50	67	0	91	114	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	48	70	0	11	14	0	4	12	0	33	44	0
Jumla Sub A		474	687	1.306.987.953,85	156	212	135.288.442,52	79	125	442.770.011,00	239	350	728.929.500,33
B	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2021												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	385	611	1.627.934.672,04	294	455	1.341.556.798,04	44	79	254.283.424,00	47	77	32.094.450,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	422	673	0	283	435	0	62	121	0	77	117	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	77	119	0	59	89	0	13	23	0	5	7	0
Jumlah Sub B		884	1.403	1.627.934.672,04	636	979	1.341.556.798,04	119	223	254.283.424,00	129	201	32.094.450,00

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2020												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	311	441	1.504.235.041,96	287	414	1.178.751.661,96	10	11	5.888.210,00	14	16	319.595.170,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	389	465	0	357	426	0	16	22	0	16	17	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	75	114	0	74	113	0	1	1	0	0	0	0
Jumlah Sub C		775	1.020	1.504.235.041,96	718	953	1.178.751.661,96	27	34	5.888.210,00	30	33	319.595.170,00
D	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2019												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	810	1.054	4.322.690.131,30	759	992	4.192.480.457,63	42	56	130.209.673,67	9	6	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	528	771	0	510	726	0	9	11	0	9	34	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	192	230	0	187	225	0	3	3	0	2	2	0
Jumlah Sub D		1.530	2.055	4.322.690.131,30	1.456	1.943	3.994.483.869,63	54	70	286.039.271,67	20	42	42.166.990,00
E	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2018												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	865	1.368	2.049.627.784,04	815	1302	1.882.586.566,40	29	44	167.041.217,64	21	22	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	552	708	0	512	662	0	10	10	0	30	36	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	224	295	0	220	287	0	1	4	0	3	4	0

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah Sub E		1.641	2.371	2.049.627.784,04	1.547	2.251	1.882.586.566,40	40	58	167.041.217,64	54	62	0
F	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2017												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	707	1.142	1.594.602.531,09	700	1.129	1.583.737.349,64	7	13	10.865.181,45	0	0	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	294	425	0	286	407	0	8	18	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	167	222	0	167	222	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Sub F		1.168	1.789	1.594.602.531,09	1.153	1.758	1.583.737.349,64	15	31	10.865.181,45	0	0	0
G	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2016												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	1.241	1.720	13.641.333.386,06	1.210	1.658	13.362.545.932,62	31	62	278.787.453,44	0	0	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	564	718	6.495.000,00	548	697	6.495.000,00	16	21	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	310	426	0	302	406	0	8	20	0	0	0	0
Jumlah Sub G		2.115	2.864	13.647.828.386,06	2.060	2.761	13.369.040.932,62	55	103	278.787.453,44	0	0	0
H	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2015												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	1.212	1.768	5.913.404.678,10	1.185	1.713	4.206.041.662,72	26	54	1.707.363.015,38	1	1	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	677	847	0	667	830	0	10	17	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	371	485	0	368	480	0	3	5	0	0	0	0

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah Sub H		2.260	3.100	5.913.404.678,10	2.220	3.023	4.206.041.662,72	39	76	1.707.363.015,38	1	1	0
I	REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2014												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	930	1.379	3.314.912.103,62	889	1.294	2.631.414.698,94	33	76	682.675.182,68	8	9	822.222,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	475	607	0	466	596	0	3	4	0	6	7	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	413	544	0	407	536	0	2	4	0	4	4	0
Jumlah Sub I		1.818	2.530	3.314.912.103,62	1.762	2.426	2.631.414.698,94	38	84	682.675.182,68	18	20	822.222,00
J	SALDO REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2007 S.D TA 2013												
Sub Jumlah J		13.466	15.936	305.513.433.262,68	13.312	15.760	49.390.770.664,40	129	143	256.122.662.598,28	25	33	0
Jumlah A s.d. J		26.131	33.755	340.795.656.544,74	25.020	32.066	79.911.669.234,87	595	947	259.808.918.467,54	516	742	3.686.255.869,26

Semarang, Juli 2022
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Inspektur Pembantu Khusus


DHONI WIDIANTO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2011 S.D. 2021**

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
	Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	HP TAHUN 2021													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	2	4	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	4	0,00	
	Sub Jumlah A	2	4	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	4	0,00	
B	HP TAHUN 2020													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	3	3	0,00	3	3	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah B	3	3	0,00	3	3	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
C	HP TAHUN 2019													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	13	25	0	13	25	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah C	13	25	0	13	25	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
D	HP TAHUN 2018													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	16	34	0,00	16	34	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah D	16	34	0,00	16	34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
E	HP TAHUN 2017													
	Tidak	20	29	0,00	20	29	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
	Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Mencantumkan Kode temuan													
	Sub Jumlah E	20	29	0,00	20	29		0	0	0,00	0	0	0,00	
F	HP TAHUN 2016													
	Tidak mencantumkan kode temuan	15	20	0,00	15	20	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah F	15	20	0.00	15	20	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
G	HP TAHUN 2015													
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	28	0,00	20	28	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah G	20	28	0,00	20	28	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
H	HP TAHUN 2014													
	Tidak mencantumkan kode temuan	21	31	0,00	21	31	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah H	21	31	0,00	21	31	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
I	HP TAHUN 2013													
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	21	0,00	20	21	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah I	20	21	0,00	20	21	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
J	HP Tahun 2012													
	Tidak mencantumkan kode temuan	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah J	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
K	HP Tahun 2011													
	Tidak mencantumkan kode temuan	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah K	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
		Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Total A-K	178	253	259.081.000,00	176	249	259.081.000,00	0	0	0,00	2	4	0,00	

Semarang, Juli 2022
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Inspektur Pembantu Khusus

DHONI WIDIANTO, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002

**REKAPITULASI HASIL PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2022**

Asal Pengaduan								Status Tindak Lanjut			Jumlah
Surat Aduan	Laporgub	Media Sosial	Limpahan Irjen	Limpahan Setneg	Limpahan KPK	Limpahan Menpan	Limpahan Gubernur	S	D	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	5	1	0	2	0	1	2	6	11	9	26

Semarang, Juli 2022
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Inspektur Pembantu Khusus

DHONI WIDIANTO, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19731015 199703 1 002



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 127 – 133, Sekayu,
Semarang Tengah, Kota Semarang 50132
Telp: (024) 3517283 – 3517284 – 3556230
Fax: 024 3514351
Surel: inspektorat@jatengprov.go.id